



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

BAB I Pendahuluan

1.1. Informasi Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan dirumuskan sebagai berikut : **“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup”**. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah:

1. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup ;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kantor ;



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

5. Penyelenggaraan tugas pengawasan dan analisa dampak lingkungan, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan serta penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau, pertamanan dan kebersihan ;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengawasan dan analisa dampak lingkungan, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan lingkungan serta penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau, pertamanan dan kebersihan ;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja kantor ;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi juga merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan OPD pada akhir periode Renstra OPD sesuai dengan tugas fungsi OPD sejalan dengan pernyataan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan (impian) yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan dengan rumusan visi sebagai berikut :

“Terlaksananya pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Tantangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dihadapkan pada isu meningkatnya beban pencemar. Dalam mewujudkan ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah berupaya menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung penerunan beban pencemar. Kegiatan ini diwujudkan dalam hal perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 yang dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 merupakan realisasi atas rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan tujuan sebagai berikut :

1.2. Tujuan

- a. Terwujudnya masyarakat kabupaten Solok Selatan sebagai insan yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta mengelola lingkungan hidup ;
- b. Terjaminnya kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang ;
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan ;
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana yang berpihak kepada kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 telah ditetapkan rencana kinerja keuangan yang mencakup 09 program dan 40 kegiatan.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Untuk mewujudkan visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi OPD, misi yang telah ditetapkan adalah :

- Mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap gerak pembangunan di Kabupaten Solok Selatan;
- Meningkatkan dan mengembangkan ketaatan dan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup melalui sistem dan peraturan yang berpihak kepada pranata sosial masyarakat setempat;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan OPD ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu:

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi anggaran TA 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau *mapping*.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Ñ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Ñ Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Ñ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ñ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Ñ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Ñ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Ñ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah diubah di Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- Ñ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
- Ñ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Ñ Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 28 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ñ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

- Ñ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- Ñ Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
- Ñ Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
- Ñ Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

BAB.II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB.III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Pendapatan
- 3.3. Belanja

BAB.IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1. Pendapatan LO
 - 5.2.2. Beban
- 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

5.4. Penjelasan Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas Dana

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

6.2. Rekening Pemerintah

6.3 Struktur Organisasi

BAB VII. PENUTUP



BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Solok Selatan adalah Kabupaten pemekaran dan terletak di wilayah penting konservasi dalam kaitan dengan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat dan sebagai bagian wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Kondisi geografis yang dikelilingi daerah perbukitan dan keberadaan gunung kerinci sebagai salah satu gunung api yang masih aktif, memunculkan sumber daya alam yang melimpah seperti bahan tambang dan mineral, hasil hutan, panas bumi, tanah yang subur serta ketersediaan air sebagai energi alternatif yang apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sebagai daerah pemekaran, Kabupaten Solok Selatan membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pemerintahan dengan konsekuensi timbulnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan eksploitasi sumber daya alam, Solok Selatan dihadapkan pada beberapa kendala yang berkaitan dengan masalah lingkungan sehingga terjadi berbagai konflik kepentingan yang belum tertangani dengan baik terutama terkait kegiatan pertambangan.

Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat sekaligus sebagai pemberi mandatory kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

lingkungan hidup, telah memberi batasan yang jelas kinerja minimal yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup sebagai payung dasar sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diperjelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan dengan uraian tupoksi dimuat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Solok Selatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan diatur dengan Perda Nomor 8 tahun 2008 dimana dinyatakan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Urusan Lingkungan Hidup, serta kebijakan yang ditetapkan kepala daerah. Untuk melaksanakan pokok tersebut, pada tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan mempunyai anggaran sebesar Rp 37.289.419.293,00,-. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

2.2 Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan. Kebijakan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam mengelola APBD tahun anggaran 2018 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan walaupun ada perubahan pada fisik barang jasa dan bangunan dalam DPA 2018. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektivitas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan indikator hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 12 (dua belas) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terselenggaranya surat menyurat dinas selama satu tahun.
2. Tersedianya jasa komunikasi penyediaan air dan listrik satu tahun.
3. Tersedianya jasa administrasi selama satu tahun
4. Tersedianya perbaikan peralatan kerja untuk satu tahun.
5. Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun.
6. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinas untuk satu tahun.
7. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
9. Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat kantor selama satu tahun.
10. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah selama satu tahun.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

11. Tersedianya Belanja jasa pendukung administrasi kantor selama satu tahun.
12. Tersedianya alat dan bahan kebersihan selama satu tahun.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun.
2. Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas selama satu tahun.

III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan kebersihan ditempat-tempat umum dan pengangkutan sampah selama satu tahun.
2. Terbentuknya kelompok pengelolaan sampah/ bank sampah.
3. Terbentuknya kelompok pengelolaan sampah (41 kelompok).
4. Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat.
5. Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat dan sekolah.
6. Terlaksananya Gerakan Solok Selatan Bersih.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

IV. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Tersusunnya Draft Ranperbup mengenai perizinan UKL-UPL/SPPL Kabupaten Solok selatan.
2. Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pengurusan izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).
3. Terlaksananya tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap kejadian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
4. Tersediannya sarana dan prasarana pengendali pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (9 Paket).
5. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup (25 usaha/kegiatan).
6. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 (20 fasilitas pelayanan kesehatan, 5 perusahaan).
7. Terlaksananya inspektasi pada usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (3 usaha/kegiatan).

V. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Teridentifikasi jasa lingkungan untuk ekowisata.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

2. Terbentuknya jorong atau nagari yang berupaya melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (3 nagari proklamasi).
3. Teridentifikasi kelompok-kelompok ataupun perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup.
4. Tersedianya dokumen daya dukung lingkungan.
5. Tersedianya dokumen informasi kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terbinanya sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
2. Tersedianya satu buku SLDH dan informasi LH.

VII. Program Pengendalian Polusi

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengujian emisi udara akibat aktivitas industri.
2. Terlaksananya pengujian kualitas air.
3. Terlaksananya uji udara ambient pada lokasi (24 titik).



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

VIII. Program Pengendalian Kebakaran Hutan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan kebakaran hutan (100 orang peserta).

IX. Program Pengembangan Perumahan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terbitnya 1 dokumen tentang NSPM.
2. 12 laporan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
3. 11 Paket kebutuhan transportasi pedesaan untuk masyarakat.
4. 5 Paket Pengadaan jaringan distribusi.
5. Pengadaan alat-alat listrik dan elektronik.
6. 12 Pembayaran rekening listrik PJU.
7. 2 Paket kebutuhan saluran drainase untuk kawasan permukiman kumuh.

X. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. 11 Paket bertambahnya sarana sanitasi masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

XI. Program Pemberdayaan Komunikasi Perumahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. 6 jorong potensi SR bagi MBR penerima program hibah PAMSIMAS.

XII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. 11 Paket jumlah yang tertata dengan baik.
2. 3 Paket jumlah RTH yang tersedia.

XIII. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. tersediannya TPU Untuk Pemakaman.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan OPD memperoleh target alokasi anggaran belanja dengan rincian sebesar Rp 37.289.419.293,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 2.848.405.082,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.178.114.211,00
- Belanja Modal Rp. 15.262.900.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan dalam tahun anggaran 2018 tercatat sebesar Rp. 37.289.419.293,00 Jumlah tersebut mencapai 83,74 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 31.226.891.343,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada di bawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.820.715.649,00 atau 99,03 %, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 18.621.795.694,00 atau 97,10 %, dan belanja modal sebesar Rp. 9.784.380.000,00 atau 64,11 % dari jumlah anggarannya.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

3.2 Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 diperoleh realisasi Pendapatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 70.000.000,00. Pendapatan ini dari realisasi retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 6.458.000,00 dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 13.070.454,00. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan menganggarkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah mulai tahun 2018 ini sebesar Rp. 21.055.454,00

3.3 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

Tabel. 1

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	37,259,419,293.00	31,226,891,343.00	83.81	6,032,527,950.00
I	BELANJA OPERASI	22,026,519,293.00	21,442,511,343.00	97.35	584,007,950.00
1	Belanja Pegawai	2,848,405,082.00	2,820,715,649.00	99.03	27,689,433.00
2	Belanja Barang dan Jasa	19,178,114,211.00	18,621,795,694.00	97.10	556,318,517.00
II	BELANJA MODAL	15,232,900,000.00	9,784,380,000.00	64.23	5,448,520,000.00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,003,700,000.00	964,453,000.00	96.09	39,247,000.00
2	Belanja gedung & bangunan	1,810,000,000.00	1,729,420,000.00	95.55	80,580,000.00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	12,419,200,000.00	7,090,507,000.00	57.09	5,328,693,000.00



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Seluruh realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018 mencapai 83,81 % dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPA Perubahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp. 680.964.696,00 dan realisasi Rp.664.531.089,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 96,74 %, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Rp. 7.000.000,00 dan realisasi Rp.6.715.000,00 atau sebesar 95,93%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat dan lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2018 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Rp. 20.400.000,00 dan realisasi Rp.17.680.017,00 atau sebesar 86,87%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2018 dan hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah lancarnya operasional kegiatan dinas. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi fisik 100 % sedangkan Realisasi keuangan sebesar 86,87 %.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Anggaran Rp. 167.670.000,00 dan realisasi Rp.152.570.000,00 atau sebesar 92,65%. Kegiatan ini sebagian besar merupakan penyediaan honor pengelola keuangan OPD seperti Honor KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu, Bendahara gaji, Bendahara barang, operator Simda dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2018.

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Anggaran Rp. 5.500.000,00 dan realisasi Rp.3.555.000 atau sebesar 64,64%. Penyediaan perbaikan Peralatan Kerja selama tahun anggaran 2018. Yaitu belanja pemeliharaan dan perlengkapan kantor seperti pemeliharaan



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

komputer, laptop, AC, Mesin Tik, mesin air sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan.

5. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Anggaran Rp. 34.000.000,00 dan realisasi Rp.33.999.500,00 atau sebesar 100%. Kegiatan Alat Tulis Kantor dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat dan lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2018 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat.

6. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Anggaran Rp. 30.000.000,00 dan realisasi Rp. 27,648.400,00 atau sebesar 92,16%. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama tahun anggaran 2018. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100 %.

7. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Anggaran Rp. 5.000.000,00 dan realisasi Rp.4.998.000,00 atau sebesar 99,69 %. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 53.700.000,00 dan realisasi Rp.52.649.000,00 atau sebesar 98,04 %. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama tahun anggaran 2018. Yaitu penyediaan peralatan las, mesin potong rumput, gorden, laptop, printer, travo step up, meja pejabat eselon III, infocus.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran Rp. 35.000.000,00 dan realisasi Rp.22.110.000,00 atau sebesar 63,17 %. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama tahun 2018 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Anggaran Rp. 273.000.000,00 dan realisasi Rp.256.824.915,00 atau sebesar 94,08%. Selama tahun anggaran 2018 Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta Event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

Anggaran Rp 106.200.000,00 dengan realisasi Rp.106.200.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran jasa Tenaga kerja Non Pegawai.

12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Anggaran Rp. 6.079.211,00 dan realisasi Rp. 6.070.000,00 atau sebesar 99,85 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Selama Tahun 2018 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok selatan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan realisasi Rp. 261.423.371,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 87.14 % hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran Rp. 54.000.000,00 dan realisasi Rp. 51.626.500,00 atau sebesar 95,60%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Anggaran Rp. 246.000.000,00 dan realisasi Rp. 209.796.871,00 atau sebesar 85,28%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Dinas/Operasional SKPD menyediakan dana untuk belanja servis kendaraan, suku cadang, BBM dan pelumas, STNK serta belanja perbaikan kendaraan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100 % sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran sedangkan realisasi keuangan 85,28%.

C. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

Anggaran sebesar Rp. 2.069.120.000,00,- dan realisasi Rp 1.905.405.000,00 atau sebesar 92,09% pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Anggaran Rp 1.453.470.000,00 dan realisasi Rp. 1.444.377.863,00 atau sebesar 99,37%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terkelolanya sampah domestik. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya sarana dan prasarana persampahan 12 unit mesin pencacah plastik untuk kelompok peduli sampah dan bank sampah.

2. Kegiatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Anggaran Rp. 35.000.000,00 dan realisasi Rp. 33.580.000,00 atau sebesar 95,94%. Terbinannya kelompok pengelola sampah/bank sampah aktif kabupaten solok selatan.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

3. Kegiatan Pelatihan dan pengelolaan Sampah Bagi Masyarakat dan Sekolah

Anggaran Rp. 44.150.000,00 dan realisasi Rp. 44.150.000,00 atau sebesar 100%. Hasil dari diadakan nya pelatihan ini dapat terkelolahnya sampah domestic di kabupaten solok selatan.

4. Kegiatan Budaya Bersih (Gerakan Solok Selatan Bersih)

Anggaran Rp. 44.900.000,00 dan realisasi Rp. 44.764.000,00 atau sebesar 99.70%. Hasil dari diadakan kegiatan ini dapat meningkatkan kebersihan lingkungan permukiman di kabupaten solok selatan.

5. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Anggaran Rp 491.600.000,00,- dan realisasi Rp. 338.533.200,00,- atau sebesar 68.86%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terkelolanya sampah domestik. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya sarana dan prasarana persampahan 12 unit mesin pencacah plastik untuk kelompok peduli sampah dan bank sampah.

D. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp. 942.610.000,00 dan realisasi Rp. 813.171.160,00,- atau sebesar 86.27%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

1. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Anggaran Rp 27.750.000,00 dengan realisasi Rp.22.699.000,00 atau sebesar 81.80%. Dengan adanya Kegiatan ini terminimalisasinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Anggaran Rp 156.790.000,00 dengan realisasi Rp. 107.747.160,00 atau sebesar 68.72%. Dengan adanya Kegiatan ini terminimalisasinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan Perizinan.

Anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.647.000,00 atau sebesar 74.51%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya tanggungjawab pihak pelaksana usaha dan/atau kegiatan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan Perizinan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Realisasi keuangan 74.51% disebabkan efisiensi penggunaan anggaran antara lain dari belanja penyebar luasan informasi dan sewa sarana mobilitas.

Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi terlaksananya penerbitan izin lingkungan dan rekomendasi.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

4. Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp. 40.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 33.897.000,00 atau sebesar 84.43%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terminimallisasinya potensi-potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antar masyarakat maupun antar perusahaan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu terlaksananya tindak lanjut aduan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya kegiatan tersedianya dan terlaksananya pelayanan SPM dibidang pengaduan masyarakat.

5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup (DAK LH)

Anggaran sebesar Rp. 654.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 590.978.000,00 atau sebesar 90.27%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengawasan perusahaan disunia usaha khususnya dibidang lingkungan hidup.

6. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Medis

Anggaran sebesar Rp. 42.220.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.203.000,00 atau sebesar 99.96%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah salah satunya terkelolanya Limbah dan Limbah B3.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

E. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Anggaran sebesar Rp. 5.380.550.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.044.033,00 atau sebesar 1.04%, Maksud dan tujuan kegiatan ini memaksimalkan permintaan kebutuhan perumahan untuk Kabupaten solok selatan.

1. Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat (Swakelola/Pemberdayaan).

Anggaran sebesar Rp. 5.380.550.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.044.033,00 atau sebesar 1.04%, Maksud dan tujuan kegiatan ini memaksimalkan permintaan kebutuhan perumahan untuk Kabupaten solok selatan bagi MBR dari tahun ke tahun dan bisa memfasilitasi Masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan tempat tinggal dan rumah yang layak dihuni.

F. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Anggaran sebesar Rp 336.900.000,00 dan realisasi Rp.280.590.096,00 atau sebesar 88.27% pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Anggaran sebesar Rp. 83.190.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.479,00 atau sebesar 94.34%, Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan di kabupaten solok selatan.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

2. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Anggaran sebesar Rp. 128.620.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.622.000,00 atau sebesar 68.90%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Menurunnya emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output terbinanya kampung peduli perubahan iklim/kampung iklim. Realisasi keuangan dibawah 68.90% disebabkan efisiensi penggunaan anggaran antara lain dari belanja bahan bakar minyak dan belanja makanan dan minuman kegiatan.

3. Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam

Anggaran sebesar Rp. 39.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.754.000,00 atau sebesar 89,87 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlindungi dan terkelolanya sumber daya alam di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output terbinanya kecamatan bersih dan hijau.

4. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Anggaran sebesar Rp. 34.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.454.096,00 atau sebesar 89.57%. Maksud dan tujuan kegiatan ini agar Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dapat dipedomankan sebagai dasar untuk penetapan RTRW, RTBL, RDTR dan RDD LH.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

5. Kegiatan Inventarisasi Penenganan Kerusakan Lahan Akibat BioMassa

Anggaran sebesar Rp. 51.590.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.281.000,00 atau sebesar 89.71%. Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk pelayanan dokumen informasi kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

G. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Anggaran sebesar Rp. 155.000.000,00 dan realisasi Rp.142.188.162,00 atau sebesar 91.73% pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatam Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp. 131.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 123.880.162,00 atau sebesar 94.57%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya generasi yang mencintai dan berwawasan lingkungan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output terbinanya sekolah adiwiyata.

2. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.308.000,00 atau sebesar 76.28%. Maksud dan tujuan kegiatan ini tersedianya data status lingkungan hidup daerah yang mencerminkan kondisi



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

lingkungan hidup . Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output tersusunnya buku SLHD dan buku data SLHD tahun 2018 serta dokumen MIH.

H. Peningkatan Pengendalian Polusi

Anggaran sebesar Rp.245.210.000,00 dan realisasi Rp.191.570.524,00 atau sebesar 78.13% pelaksanaannya belum efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Anggaran sebesar Rp. 32.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.208.700,00 atau sebesar 71.41%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kualitas udara untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara umum.

2. Kegiatan Pengujian Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Anggaran sebesar Rp. 174.210.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.517.758,00 atau sebesar 77.79%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kualitas air untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara umum . Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output adanya data dan informasi kualitas air sungai dan limbah usaha/kegiatan secara berkala.

3. Kegiatan Udara Ambien



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Anggaran sebesar Rp. 38.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.844.066,00 atau sebesar 85.31%. Maksud dan tujuan kegiatan ini agar terlaksananya ujian udara ambient pada lokasi (24 titik).

I. Program Pengembangan Perumahan

Anggaran sebesar Rp.12.008.058.000,00 dan realisasi Rp. 11.965.721.333 atau sebesar 99.65% pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Anggaran sebesar Rp. 48.135.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.045.992,00 atau sebesar 95.66%, Maksud dan tujuan kegiatan ini memaksimalkan permintaan kebutuhan perumahan untuk Kabupaten solok selatan bagi MBR dari tahun ke tahun.

2. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat Kurang Mampu.

Anggaran sebesar Rp. 928.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 920.340.236,00 atau sebesar 99.15%, Maksud dan tujuan kegiatan ini memaksimalkan permintaan kebutuhan perumahan untuk Kabupaten solok selatan bagi MBR dari tahun ke tahun dan bisa memfasilitasi Masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan tempat tinggal dan rumah yang layak dihuni.

3. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Anggaran sebesar Rp. 299.125.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.547.771,00 atau sebesar 99.81%, Maksud dan tujuan kegiatan ini yakni terciptanya infrastruktur drainase yang baik dan optimal dan mengamankan kawasan permukiman masyarakat dari genangan.

4. Kegiatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)

Anggaran sebesar Rp. 5.344.740.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.323.656.694,00 atau sebesar 99.61%, Maksud dan tujuan kegiatan ini yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur pedesaan.

5. Kegiatan Materisasi Lampu PJU

Anggaran sebesar Rp. 316.225.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 315.738.000,00 atau sebesar 99.85 %, Maksud dan tujuan kegiatan ini yakni tersedianya lampu PJU yang termeterisasi PJU.

6. Kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Lampu PJU

Anggaran sebesar Rp. 1.468.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.461.539.023,00 atau sebesar 99.51%, Maksud dan tujuan kegiatan ini yakni untuk penerangan bagi masyarakat.

7. Kegiatan Pembayaran Lampu PJU

Anggaran sebesar Rp. 3.602.833.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.599.853.617,00 atau sebesar 99.93%, Maksud dan tujuan kegiatan ini. Untuk 12 bulan pembayaran rekening listrik PJU.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

J. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Anggaran sebesar Rp.10.031.270.000,00 dan realisasi Rp. 10.023.854.913,00 atau sebesar 99,93%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK Sanitasi)

Anggaran sebesar Rp.10.031.270.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.023.854.913,00 atau sebesar 99,9 %, Maksud dan tujuan kegiatan ini. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.

K. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Anggaran sebesar Rp. 2.119.617.000 dan realisasi Rp. 1.939.732.207,00 atau sebesar 91.51% pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penataan RTH

Anggaran sebesar Rp.83.892.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.197.000,00 atau sebesar 99.17%, Maksud dan tujuan kegiatan ini. Untuk Penyediaan ruang terbuka hijau yang tertata dan terencana dengan baik.

2. Kegiatan Pengadaan RTH

Anggaran sebesar Rp.2.035.725.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.856.535.207,00 atau sebesar 91.20%, Maksud dan tujuan kegiatan ini.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Untuk Penyediaan ruang terbuka hijau yang tertata dan terencana dengan baik yang bersih, aman, nyaman, sehat dan asri.

L. Program Pengelolaan Areal Pemekaman

Anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi Rp.349.850.000,00 atau sebesar 99.96%, pelaksanaannya dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.850.000,00 atau sebesar 99.96%. Maksud dan Tujuan Kegiatan untuk menyediakan TPU untuk masyarakat yang tidak mempunyai tempat pemakaman yang layak.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada Pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kas

- Pengukuran Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

- Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi atau surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan,



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

- Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan..
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis

- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

BAB V Penjelasan Pos-pos

Laporan keuangan tahun anggaran 2018 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dan belanja menggambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan selama satu tahun yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran dan belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, berikut disajikan penjelasan sebagai berikut :

5.1.1. Pendapatan



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Pendapatan Daerah pada anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dan Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 70.000.000,00- sedangkan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 21.055.454,00,- atau sebesar 30,08 %.

5.1.2. Belanja

Anggaran belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 37.289.419.293,00- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 31.226.891.343,00,- atau sebesar 83.74%. Rincian atas jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2018 tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 37,219,419,293.00- dari total anggaran Rp21,442,511,343.00- atau sebesar Rp. 97,35 %. Capaian realisasi belanja operasi tahun 2018 naik Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan capaian dimana anggarannya terealisasi Rp. 15.490.247.577,00 , -

Namun jika dilihat dari jumlah anggarannya, maupun realisasi belanja operasi Tahun 2017 dan Tahun 2018. Berikut rinciannya :

Tabel.2
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2018



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
	BELANJA	37,289,419,293.00	31,226,891,343.00	83.74	22,018,521,150.00
I	BELANJA OPERASI	22,026,519,293.00	21,442,511,343.00	97.35	15,490,247,557.00
1	Belanja Pegawai	2,848,405,082.00	2,820,715,649.00	99.03	1,350,702,976.00
2	Belanja Barang dan Jasa	19,178,114,211.00	18,621,795,694.00	97.10	14,139,544,581.00
II	BELANJA MODAL	15,262,900,000.00	9,784,380,000.00	64.11	6,528,273,593.00
1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,033,700,000.00	964,453,000.00	93.30	602,452,493.00
3	Belanja gedung & bangunan	1,810,000,000.00	1,729,420,000.00	95.55	1,816,060,100.00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	12,419,200,000.00	7,090,507,000.00	57.09	4,109,761,000.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Surplus/Defisit	(37,219,419,293.00)	(31,219,758,343.00)	83.88	(22,009,263,150.00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(37,219,419,293.00)	(31,219,758,343.00)	83.88	(22,009,263,150.00)

5.1.2.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 2.610.535.082,00,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.606.320.649,00,- atau sebesar 82,49 %.

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)

No.	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Pegawai	2,610,535,082	2,563,640,053	98.20
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,625,772,998	1,582,766,653	97.35
1	Gaji pokok PNS/Uang Repletansi	1,251,080,100	1,251,080,100	100.00
2	Tunjangan Keluarga	118,631,764	118,306,464	99.73
3	Tunjangan Jabatan	138,840,000	138,840,000	100.00
4	Tunjangan Fungsional Umum	41,825,000	41,825,000	100.00
5	Tunjangan Beras	74,520,180	74,520,180	100.00
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	856,494	449	0.05
7	Pembulatan Gaji	19,460	19,460	100.00



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Belanja Tambahan Penghasilan		984,762,084	980,873,400	99.61
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	984,762,084	980,873,400	99.61
	Jumlah	2,610,535,082	2,563,640,053	98.20

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja _ Fungsional)

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 s/d 2018
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)

No.	Jenis Pengeluaran	Realisasi 2017	Realisasi 2018	%
Belanja Pegawai		2,610,535,082	2,563,640,053	0.02
Belanja Gaji dan Tunjangan		1,625,772,998	1,582,766,653	0.03
1	Gaji pokok PNS/Uang Repretansi	867,457,692	1,251,080,100	(0.31)
2	Tunjangan Keluarga	75,524,020	118,306,464	(0.36)
3	Tunjangan Jabatan	104,820,000	138,840,000	(0.25)
4	Tunjangan Fungsional Umum	0	41,825,000	(1.00)
5	Tunjangan Beras	52,142,400	74,520,180	(0.30)
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	217,146	449	482.62
7	Pembulatan Gaji	13,031	19,460	(0.33)
Belanja Tambahan Penghasilan		249,278,750	980,873,400	(0.75)
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	249,278,750	980,873,400	(0.75)
	Jumlah	2,610,535,082	2,563,640,053	0.02

5.1.2.3. Belanja Barang dan Jasa



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Belanja Barang dan Jasa dalam tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 14.642.281.000,00- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 14.139.544.581.00,- atau sebesar 96,57 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018
(Rincian Per Jenis Belanja Barang dan Jasa)

No.	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Alat Tulis Kantor	42,400,000	41,857,500	98.72
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	105,000,000	104,938,000	99.94
3	Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya	12,838,000	12,346,000	96.17
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7,079,211	6,615,000	93.44
5	Belanja Alat Kebersihan Habis Pakai*)	1,500,000	1,205,000	80.33
6	Belanja Peralatan Persampahan*)	50,000,000	50,000,000	100.00
7	Belanja Bahan Baku Bangunan	59,250,000	58,781,737	99.21
8	Belanja Bahan/bibit Tanaman	20,000,000	12,900,000	64.50
9	Belanja Bahan Obat -Obatan	2,900,000	2,850,000	98.28
10	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	20,000,000	16,595,700	82.98
11	Belanja Bahan Hadiah*)	30,000,000	27,408,329	91.36
12	Belanja Bahan Peralatan Pelatihan*)	2,250,000	2,250,000	100.00
13	Belanja Listrik	3,620,400,000	3,614,790,634	99.85
14	Belanja Kawat/faksimili/Internet/tv kabel/tv satelit	-	-	-
15	Belanja Trasportasi dan Akomodasi*)	55,800,000	39,719,758	71.18
16	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	95,500,000	86,495,000	90.57
17	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi*)	3,000,000	-	-
18	Belanja Jasa Upah Kerja	12,000,000	9,990,000	83.25
19	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Infrastruktur*)	427,500,000	387,000,000	90.53
20	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat.	32,000,000	32,000,000	100.00
21	Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah	872,050,000	864,100,000	99.09
22	Belanja Jasa Pendamping dan Instansi Pemerintah Lainnya/Perguruan Tinggi dan Lembaga*)	6,910,000	6,910,000	100.00
23	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri*)	8,112,500	7,964,328	98.17
24	Belanja Jasa Service	72,000,000	67,129,418	93.24
25	Belanja Pengantian Suku cadang	215,000,000	192,636,125	89.60
26	Belanja Bahan bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	508,200,000	502,478,476	98.87



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

27	Belanja Jasa KIR	900,000	254,000	28.22
28	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23,000,000	17,191,550	74.75
29	Belanja Cetak	48,970,000	4,519,000	9.23
30	Belanja Pengandaan	43,534,500	35,605,200	81.79
31	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7,000,000	6,500,000	92.86
32	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000	1,000,000	100.00
33	Belanja Sewa Tempat Pembuangan Sampah*)	2,500,000	2,500,000	100.00
34	Belanja Sewa Penginapan	23,000,000	18,930,000	82.30
35	Belanja Sewa Eskavator	65,000,000	65,000,000	100.00
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91,720,000	61,450,000	67.00
37	Belanja Makanan dan minuman Tamu	1,000,000	-	-
38	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	9,800,000	9,800,000	100.00
39	Belanja Makan dan Minum Kegiatan*)	89,950,000	78,440,000	87.20
40	Belanja Makan dan Minuman Tambahan	5,000,000	80,000	1.60
41	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24,750,000	24,708,000	99.83
42	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	734,920,000	701,787,269	95.49
43	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	372,100,000	324,376,670	87.17
44	Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan	175,400,000	174,936,000	99.74
45	Belanja Kontribusi	7,500,000	6,000,000	80.00
46	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	35,000,000	33,716,000	96.33
47	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	470,000,000	291,500,000	62.02
48	Belanja Konsultasi Pengawasan	140,000,000	49,900,000	35.64
49	Belanja Yang diserahkan Kepada masyarakat	10,524,380,000	10,523,965,000	100
Jumlah		19,178,114,211	18,621,790,694	97.10

5.2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 6.586.575.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.528.273.593,00,- atau sebesar 99,11 % dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1 Belanja Modal Tanah

dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0,00 %. Dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Tabel. 7
Belanja Modal Tanah

No.	Jenis Pengeluaran	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
1	Belanja Modal Tanah- Pengadaan Tanah Kuburan	50.000.000	0	0,00%
		50.000.000,00	0,00	0,00%

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan mesin

dengan anggaran sebesar Rp. 1.033.700.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.964.453.000,00,- atau sebesar 93,30 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2018
(Rincian Per Jenis Belanja Peralatan dan Mesin)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40,000,000.00	37,674,000.00	94.19
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkut Barang	200,000,000.00	193,230,000.00	96.62
4	Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	2,000,000.00	-	-
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	-	-	-
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12,800,000.00	11,750,000.00	91.80
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeliar	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal komputer	65,000,000.00	64,800,000.00	99.69
9	Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24,200,000.00	24,099,000.00	99.58



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	618,000,000.00	561,200,000.00	90.81
	JUMLAH	1,033,700,000.00	964,453,000.00	93.30

5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

sebesar Rp.1.810.000.000,00 ,- terealisasi sebesar Rp. 1.729.420.000,00,-
atau sebesar 95,55 %. dengan rincian berikut :

Tabel.8
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran	Realisai	%
1	Belanja Modal Gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan kantor	00,00	00,00	-
2	Belanja Modal Gedung dan bangunan- Pengadaan bangunan Gedung Tempat kerja dan lainnya	1.810.000.000,00	1.729.420.000,00	95,55
3	Belanja Modal Gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Bangunan	00,00	00,00	
	Jumlah	1.810.000.000,00	1.729.420.000,00	95,55

5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

sebesar Rp. 12.419.200.000,00,- terealisasi sebesar Rp.
7.090.507.000,00, atau sebesar 57.09 %. dengan rincian berikut :

Tabel 9

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
----	--------	----------	-----------	---



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan desa	3,570,000,000.00	3,568,062,500.00	99.95
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembakatan Desa	100,000,000.00	99,945,000.00	99.95
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	1,779,000,000.00	1,778,292,500.00	99.96
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	100,000,000.00	99,897,000.00	99.90
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan	5,321,000,000.00	-	
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Trasmisi	309,200,000.00	309,010,000.00	99.94
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1,240,000,000.00	1,235,300,000.00	99.62
	JUMLAH	12,419,200,000.00	7,090,507,000.00	57.09

5.2. LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. PENDAPATAN-LO

5.2.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Tabel. 11

Perkiraan	2018
Pendapatan Retribusi Daerah	21.055.454,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2018. Pendapatan ini terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 19.555.454,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.450.000,00



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Tidak ada perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb.:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Retribusi Daerah	9.952.000,00	9.952.000,00	0,00
Jumlah	9.258.000,00	9.258.000,00	0,00

5.3 BEBAN

Beban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebesar Rp 23,198,458,533.00 Tahun 2017 Rp 16,484,213,329.00 Terjadi Kenaikan Pada Tahun 2018 Sebesar Rp 6,714,245,204.00.

	2018	2017	Kenaikan/Penurunan	%
BEBAN				
Beban Pegawai - LO	2,845,323,106.00	1,351,102,480.00	1,494,220,626.00	110.59%
Beban Persediaan	10,882,466,620.00	6,467,138,425.00	4,415,328,195.00	68.27%
Beban Jasa	5,639,265,349.00	5,218,314,856.00	420,950,493.00	0.00%
Beban Pemeliharaan	670,990,519.00	535,943,106.00	135,047,413.00	0.00%
Beban Perjalanan Dinas	1,026,163,939.00	1,037,450,413.00	(11,286,474.00)	0.00%
Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00%
Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00%
Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,600,029,133.00	1,195,541,799.00	404,487,334.00	33.83%
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Beban Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00%
Beban Lain-lain	534,219,867.00	678,722,250.00	(144,502,383.00)	-21.29%
JUMLAH BEBAN	23,198,458,533.00	16,484,213,329.00	6,714,245,204.00	40.73%



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO sebesar Rp 2,845,323,106.00 merupakan Belanja Pegawai

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp.10,882,466,620.00 merupakan Belanja Persediaan

3. Beban Jasa

Beban Jasa – LO sebesar Rp 5,639,265,349.00 merupakan Belanja Jasa

4. Belanja Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan – LO sebesar Rp 670,990,519.00 merupakan Belanja Pemeliharaan.

5. Belanja Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas – LO sebesar Rp 1,026,163,939.00 merupakan Belanja Perjalanan Dinas.

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 20,508,818,301.00 adalah saldo Ekuitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2018. Rincian Perubahan Ekuitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Tabel. 12
PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	12,871,898,784.00	6,754,229,916
SURPLUS/DEFISIT-LO	(23,191,973,533.00)	(16,474,955,329
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	(
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	(
Koreksi ekuitas lainnya	(485,856,605.00)	583,360,876
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	31,314,749,655.00	22,009,263,321
EKUITAS AKHIR	20,508,818,301.00	12,871,898,784

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp 198.911.096,00 jika dibanding saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 86.763.617,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 13
Aset Lancar

URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara Kapitasi JKN	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	826.300,00
Setara Kas	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	2.500.000,00	1.041.667,00
Persediaan	196.411.096,00	84.895.650,00
JUMLAH ASET LANCAR	198.911.096,00	86.763.617,00

2. Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00 dan Saldo Kas lainnya per 2017 Rp 826.300,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab yang per tanggal neraca.

3. Beban dibayar dimuka

Saldo Kas dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.500.000,00 dan Saldo Kas dibayar dimuka per 2017 Rp 1.041.667,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab yang per tanggal neraca.

4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp 196.411.096,00 dan Rp 84.895.650,00. Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang berupa alat tulis kantor, bahan kimia, suku cadang, serta alat kebersihan (K3) per 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan hasil opname fisik barang.

5. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 20.302.737.868,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 12.764.295.002,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 14
Aset Tetap

URAIAN	2018	2017
Tanah	657.608.320,00	657.608.320,00
Peralatan dan Mesin	10.313.300.516,00	9.516.758.126,00
Gedung dan Bangunan	2.044.480.600,00	2.044.480.600,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.451.830.201,00	2.751.511.944,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.100.002.017,00	3.458.390.665,00
Akumulasi Penyusutan	(7.264.483.786,00)	(5.664.454.653,00)
JUMLAH ASET TETAP	20.302.737.868,00	12.764.295.002,00

5.4.1.1.1. Tanah

Saldo tanah gedung / bangunan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 657.608.320,00 dan Rp 657.608.320,00

5.4.1.1.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp10.313.300.516,00,- dan Rp 9.516.758.126,00

5.4.1.1.3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 2.044.480.600,00 dan Rp 2.044.480.600,00.

5.4.1.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 9.451.830.201,00 dan Rp 2.751.511,944,00.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

5.4.1.1.5. Akumulasi Penyusutan

Saldo penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing dan Rp (7.264.483.786,00) dan Rp (5.664.454.653,00).

5.4.1.2. Aset Lainnya

5.4.1.2.1. Aset Lain-lain

Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan aset lain-lain per 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp 340.349.082,00 dan tahun 2017 sebesar Rp 295.950.222,00.

Tabel. 15
Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2017	295.950.222,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00
Aset Lain-lain	340.349.082,00
Saldo per 31 Desember 2018	340.349.082,00

Mutasi Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

5.4.2. KEWAJIBAN

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 333.179.745,00. sedangkan tahun 2017 Sebesar Rp 2.706.420,00.



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

Tabel. 16

Kewajiban Jangka Pendek

1	Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2018	Tahun 2017
		333.179.745,00	2.706.420,00

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 ini terdiri atas :

5.4.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan yang merupakan selisih antara nilai Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek.



Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 22.108.847.434,00 dan Rp 13.144.302.421,00.

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi- Informasi Non Keuangan

6.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan

6.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan adalah :

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	1301.0101.00175-8	Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan / Elsa Nike Saputri, A.Md.

6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sekretaris



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

3. Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

4. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

5. Bidang Penyehatan Lingkungan :

Adapun jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan per Desember 2018 berjumlah 30 orang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai per Bidang :

NO	Seksi	JUMLAH
1	Sekretaris	7 orang
2	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8 orang
3	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	8 orang
4	Bidang Penyehatan Lingkungan	7 orang
	Jumlah	30 orang



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan:

No.	Golongan	Jumlah
1	I/a	-
2	I/b	-
3	I/c	1 orang
4	I/d	-
5	II/a	2 orang
6	II/b	-
7	II/c	3 orang
8	II/d	7 orang
9	III/a	4 orang
10	III/b	5 orang
11	III/c	2 orang
12	III/d	4 orang
13	IV/a	1 orang
14	IV/b	1 orang
15	IV/c	-
16	IV/d	-
17	PTT	-
	Jumlah	30 orang



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA & SPP	2 orang
4	D.I	-
5	D.III & D.IV	11 orang
6	S1	14 orang
7	S2	3 orang
Jumlah		30 orang



LAPORAN KEUANGAN 2018 BASIS AKRUAL

BAB VII Penutup

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Penyajian Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Daerah Kabupaten Solok Selatan menuju masyarakat madani.

Padang Aro, Maret 2019

KEPALA,

Ir. H. AMRIL BAKRI, MTP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600906 199103 1 003